

BAB I

PENDAHULUAN

Munculnya Jepang sebagai kekuatan ekonomi raksasa di dunia dari keadaan masyarakat feodal-agraris yang miskin dalam waktu hanya seratus tahun lebih sedikit sungguh merupakan suatu riwayat keberhasilan, yang hingga kini belum dapat ditandingi oleh negara-negara lain. Oleh karena Jepang hingga kini juga masih merupakan satu-satunya negara yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi modern dalam lingkungan kebudayaan non-Barat, maka Jepang sering juga dikemukakan sebagai model pembangunan yang lebih tepat bagi negara-negara berkembang lainnya, berhasil bertumbuh dalam lingkungan yang miskin akan sumber-sumber daya alam dan tanah, tetapi kaya akan sumber-sumber daya manusia¹. Dinamika Jepang yang luar biasa inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang dirasa cukup menarik buat penulis untuk membahas lebih jauh lagi mengenai Jepang. Penulis mengambil judul "**Latar Belakang Jepang Melakukan Revisi Piagam ODA tahun 2003**" karena bantuan ODA yang kemudian menjadi pokok pembahasan utama penulis. Tepatnya mengenai bantuan ODA Jepang

kepada Indonesia. Sebab seiring berjalannya waktu terdapat beberapa perubahan yang dicantumkan Jepang dalam Piagam ODA, seiring dengan kepentingan politik luar negeri yang ingin dicapai Jepang. Bermula dari hal tersebut, penulis ingin mencoba menjelaskan kepentingan-kepentingan Jepang terkait revisi tersebut berdasarkan pada kasus pemberian bantuan kepada Indonesia.

Tujuan Penelitian

Skripsi ini pada dasarnya merupakan karya tulis ilmiah sebagai hasil yang mendalam dan bersifat mandiri yang berisikan sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Karya tulis ini dimaksudkan untuk membuktikan hipotesa yang dikemukakan dalam menjawab permasalahan yang ada. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal diatas, penulis ingin menjelaskan perkembangan hubungan Indonesia dan Jepang terkait dengan kepentingan politik Jepang dalam pemberian ODA kepada Indonesia.

Pada akhirnya penulis bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S-1) Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

A. Latar Belakang Masalah

Posisi Jepang dalam percaturan politik global dewasa ini makin kuat. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat Jepang sebagai salah satu negara yang berasal dari kawasan Asia, yang umumnya dipandang sebelah mata oleh negara-negara Eropa, telah berhasil membuktikan kapabilitasnya sebagai salah satu negara yang harus diperhitungkan dalam konstelasi global saat ini. Kekuatan ekonomi menjadi salah satu kekuatan andalan Jepang untuk ikut serta berperan aktif dalam pasar dunia. Inilah cikal bakal usaha Jepang, yang tergolong sangat maju di Asia yang notabene mayoritas negara-negara nya masih dalam tahap berkembang, ikut serta dalam proses bantuan ODA. Sektor ekonomi semacam ini menjadi salah satu senjata ampuh untuk Jepang dalam mencapai kepentingannya.

Ekonomi Jepang amat terhambat oleh luas tanah yang terbatas, sumber daya alam yang miskin dan populasi penduduk yang sangat besar. Sulit bagi Jepang untuk mempertahankan pemakaian tenaga kerja sepenuhnya tanpa menimbulkan inflasi. Walaupun demikian sejak kealahannya dalam Perang Dunia II, Jepang telah menjalankan tugas sulit ini. Dalam melakukannya negara ini tidak saja berhasil membangun kembali ekonominya dari keadaan benar-benar hancur pada akhir perang, melainkan juga telah berhasil meraih tingkat kemakmuran yang tinggi sebagaimana

terlihat dewasa ini. Oleh karena itu seiring berkembang pesatnya sektor ekonomi mereka, Jepang juga turut aktif dalam ekonomi global dengan menjadi salah satu pemain pasar yang paling agresif, bersama Amerika Serikat dan China. Di antaranya dengan turut serta dalam bidang bantuan ekonomi untuk negara-negara kurang mampu atau berkembang. Pada tahun 1969 *Development Assistance Committee (DAC)* dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* memperkenalkan konsep *Official Development Assistance* atau ODA yang berarti Bantuan Resmi Pemerintah untuk Pengembangan. Dan di tahun 1970, Sidang Umum PBB mengusulkan negara-negara donor untuk mengalokasikan 0,7 persen dari GNP mereka untuk ODA.

Piagam ODA dirasakan cukup mewakili keinginan Jepang untuk berkontribusi langsung terhadap pembangunan dunia. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya Jepang yang merupakan negara maju sangat kuat dalam bidang ekonomi tetapi terbilang rentan kekuatan militernya. Hal ini merupakan imbas dari pendudukan Sekutu pasca Perang Dunia II. Jadi anjuran PBB mengenai pemberian ODA sangat tepat untuk Jepang yang memang mampu untuk ikut memberikan sumbangsih kepada negara-negara berkembang. Dengan ODA Jepang dapat ikut berkontribusi terhadap dunia

Pemanfaatan ODA Jepang sendiri difokuskan dalam empat bidang prioritas. Yaitu pengentasan kemiskinan, pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan isu-isu global dan menciptakan perdamaian. Bantuan ekonomi Jepang disalurkan melalui tiga cara, yaitu : dalam bentuk pinjaman (*Yen Loan*), hibah (*Grant Aid*) dan kerjasama teknik (*Technical Cooperation*)².

Sasaran penerima ODA diprioritaskan negara-negara ASEAN termasuk Asia Timur dan juga Indonesia tentunya, dalam rangka membina hubungan yang lebih kuat dan memperkuat jalinan kerjasama ekonomi. Sementara melihat kepentingan Jepang terhadap Indonesia, dianggap oleh Jepang cukup penting dan beralasan. Prof. Dr. Yoshinori Murai dari *Sophia University Tokyo* mengutarakan lima alasan mengapa Indonesia menempati ranking pertama sebagai penerima ODA. Yaitu adanya hubungan sejarah antara kedua negara, perang dingin Timur-Barat memperebutkan pengaruh di Asia, perlunya menjaga stabilitas Selat Malaka yang 80 persen kebutuhan energy Jepang diangkut melalui selat ini, kekayaan alam Indonesia dan terakhir adanya lobi-lobi politik di parlemen Jepang³.

² B.N. Marbun, *Manajemen Jepang*, 1995

³ Dikutip dari halaman web <http://www.beritaipstek.com/zberita-beritaipstek-2007-05-01-Istecs->
[beritaipstek-2007-05-01-Istecs-](http://www.beritaipstek.com/zberita-beritaipstek-2007-05-01-Istecs-)

Sebagaimana sudah diketahui umum, Jepang adalah kreditor bilateral terbesar kepada Indonesia, dan dalam hal itu, Indonesia adalah salah satu negara penerima bantuan terbesar bagi Jepang. Secara tradisional dasar kebijakan Jepang kepada Indonesia bertumpu pada faktor-faktor bahwa "Indonesia menempati kedudukan geografi yang penting dalam transportasi laut Jepang" dan "menyediakan minyak, gas alam dan sumberdaya alam lainnya"⁴.

Hubungan saling tergantung yang erat dalam perdagangan dan investasi juga menjadi kepentingan utama Jepang untuk 20 tahun belakangan ini. Tetapi hal ini bukan tanpa beban buat Indonesia. Jumlah pinjaman yang begitu besar telah menciptakan beban hutang yang berat pada perekonomian Indonesia. Pencairan netto dari ODA bilateral Jepang kepada Indonesia tahun 1999 kurang lebih \$ 1,6 milyar, kira-kira 60% dari bantuan bilateral yang diterima Indonesia. Pencairan netto kumulatif sampai tahun 1999 memperlihatkan bahwa Indonesia merupakan negara penerima bantuan terbesar bagi Jepang dengan jumlah \$ 15,4 milyar termasuk

Di Indonesia ada beberapa proyek ODA Jepang yang dijalankan. Antara lain Proyek Pengembangan Agribisnis Hortikultura yang dilaksanakan di 31 daerah di 15 propinsi. Dari total biaya 10.359.000.000'00 yen (dana tercairkan 8.407.000.000 yen), JBIC mengeluarkan dana sebesar 7.769.000.000 yen (dana tercairkan 4.612.000.000 yen) dan juga Proyek Pengembangan Sumber Daya Air dan Pengendalian Banjir Semarang serta masih banyak proyek-proyek lain⁶.

Operasionalisasi ODA Jepang di Indonesia sebelum revisi Piagam ODA masih berkuat dengan pemberian pinjaman Yen, bantuan hibah dan bantuan teknik. Di Indonesia pemberian bantuan bentuk pinjaman Yen difokuskan kepada pembangunan dan perbaikan fasilitas pendukung publik, semacam PLTA, jalan-jalan, bandara dan sebagainya. Bantuan hibah diberikan untuk peningkatan kualitas SDM Indonesia seperti pemberian bantuan untuk pembangunan laboratorium, pengadaan alat-alat kesehatan dan prasarana pendidikan dan kesehatan lainnya. Sementara bantuan teknik dikhususkan untuk pelatihan keterampilan dan peningkatan skill yang diberikan melalui pengiriman tenaga-tenaga ahli ke Jepang.

⁶ Ditulis dari halaman web <http://www.pindia.org/oda/definisi.html>

Pada tahun 2003 Pemerintah Jepang atas persetujuan kabinet melakukan revisi (amandemen) Piagam ODA mereka dimana hal ini salah satu alasannya disebabkan isu-isu keamanan yang makin berkembang, yang ditandai dengan adanya serangan terorisme ke Amerika Serikat. Oleh karena hal tersebut pemerintah Jepang merasa perlu untuk melakukan revisi Piagam ODA dengan menambahkan beberapa poin baru yang salah satunya berisikan tentang *human security*. *Human security* sendiri berisikan tentang penjagaan dan pembangunan keamanan yang berlandaskan kepada individu. Amerika Serikat yang dalam beberapa tahun terakhir gencar menyuarkan "war against terrorism" ikut pula menyerukan kepada sekutunya untuk ikut serta berperang melawan rezim teror yang semakin meresahkan dunia, termasuk Jepang tentunya.

Tetapi revisi Piagam ODA ini bukan tanpa kritik. Banyak LSM di Jepang yang mengatakan bahwa dalam piagam yang baru direvisi tersebut, tampak jelas bahwa Jepang akan menerapkan bantuan secara aktif dengan mempersiapkan program bantuan negara untuk tiap negara "sesuai" dengan prioritas yang Jepang pilih. Hal ini tentu saja secara tidak langsung ikut berimbas kepada pada keinginan Jepang untuk membantu negara-negara yang diproyeksikan dapat memberikan keuntungan politik maupun ekonomi kepada mereka.

Piagam ODA Jepang telah melewati penyesuaian beberapa kali. Dimulai pada rentang waktu 1954-1976, 1977-1991, 1992-2002 dan terakhir dilakukan revisi pada tahun 2003. Empat poin penting ODA sebelum revisi tahun 2003 adalah mengenai kemanusiaan, hubungan yang berdasarkan ketergantungan antara Jepang dan negara partner nya, menyediakan bantuan untuk konservasi lingkungan dalam pembangunan sosio-ekonomi dan kepentingan sentral untuk membantu usaha mandiri negara-negara berkembang melalui pemusatan ekonomi. Sementara hal paling mencolok dalam Piagam ODA Jepang pasca revisi adalah dengan ditambahkannya poin mengenai penjagaan keamanan dan *human security*.

Pemberian ODA Jepang selama ini dirasa sudah cukup baik, terlepas dari kritik mengenai kebijakan dalam pemberian bantuan tersebut. Oleh sebab itulah kemudian banyak yang mempertanyakan perihal revisi Piagam ODA Jepang yang dirasa janggal, mengingat selama ini pemberian bantuan melalui ODA berjalan tanpa ada masalah berarti yang membuat Jepang

B. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang diatas, kemudian timbul pertanyaan :

“Mengapa Jepang melakukan revisi (amandemen) Piagam ODA pada tahun 2003?”

C. Kerangka Dasar Pemikiran

Sebuah penulisan agar membentuk suatu analisa yang ilmiah sebagai hasil memahami suatu fenomena yang menjadi pusat perhatian, maka memerlukan alat bantu dalam kerangka pemikirannya. Kerangka dasar pemikiran merupakan kerangka kerja untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan menggunakan landasan teori serta menjawab pokok permasalahan kepada jawaban yang relevan dan kebenaran yang dimaksud.

Dalam penulisan ini, penulis mencoba menggunakan teori yang dianggap relevan. Dan sebagai kerangka dasar pemikiran dalam penulisan ini, penulis menggunakan sebuah teori. Yaitu:

- **Teori Pembuatan Keputusan (*Decision Making Theory*)**

William D. Choplin beranggapan bahwa politik luar negeri merupakan sikap dan komitmen suatu negara terhadap lingkungan eksternal, strategi dasar untuk mencapai tujuan kepentingan nasional yang harus dicapai di luar batas wilayah, dan itu diterapkan dalam sejumlah keputusan yang dibuat

dalam kebijaksanaan politik luar negeri suatu bangsa. Bagi para aktor pengambil keputusan dan kebijaksanaan politik luar negeri suatu bangsa akan dan harus mempertimbangkan faktor-faktor berpengaruh terhadap formulasi kebijaksanaan politik luar negeri⁷. Dikatakan William D. Choplin sebagai berikut :

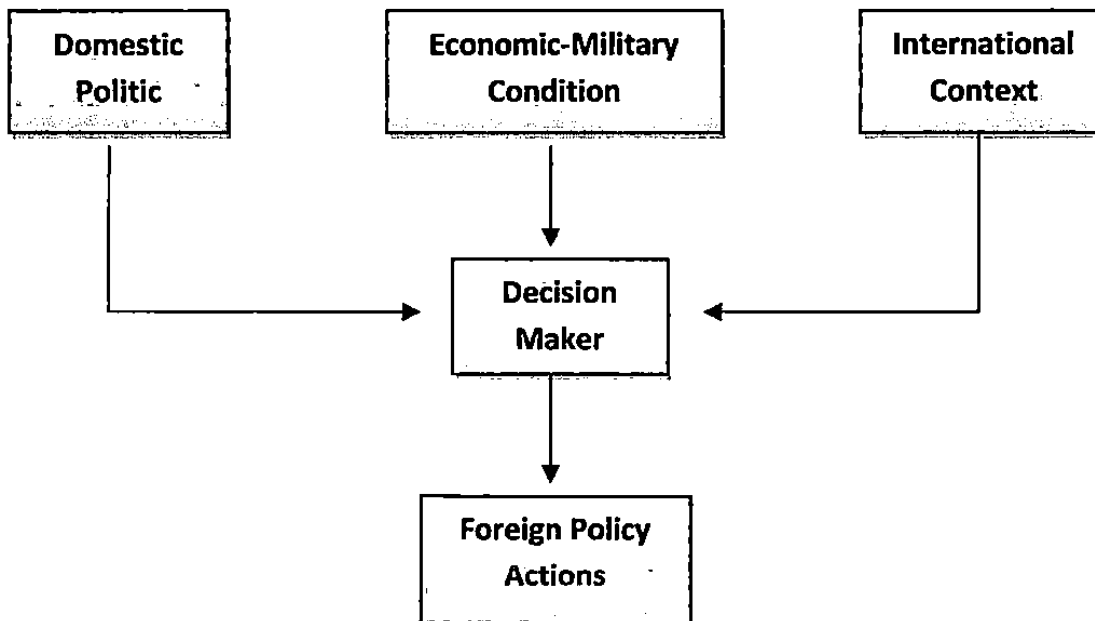
"Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan. Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi (pertimbangan) yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri: pertama, kondisi politik dalam negeri termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Kedua, situasi ekonomi dan militer negara tersebut termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan/keamanan. Ketiga, konteks internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain

⁷ *Carl Brugg, International Relations Theory: New Normative Approaches*, Harvester Wheatsheaf, New York

yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi)⁸. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1. 1.

**Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri
menurut William D. Choplin**



Dengan demikian dapat kita rumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri sebagai berikut:

1. Politik dalam negeri
2. Kondisi ekonomi dan militer dalam negeri

⁸Diadit dari Robert Jackson dan George Sorenson, *Dasar-dasar Studi Hubungan Internasional*, Duta

3. Konteks internasional yaitu suatu produk tindakan politik luar negeri seluruh negara pada masa lampau, sekarang dan akan datang yang mungkin atau diantisipasi.

Dalam konteks Jepang, faktor-faktor tersebut sangat berkaitan erat dengan pengaruh internal dan eksternal. Yaitu menyangkut hubungan Jepang dengan Amerika Serikat (eksternal) dan hubungan yang erat antara para birokrat pemerintahan dan kelompok bisnis di Jepang (internal). Situasi dan kondisi dalam politik dalam negeri Jepang cukup berbeda dibandingkan negara-negara lain. Seperti yang kita ketahui bahwa Jepang merupakan negara dengan kekuatan ekonomi raksasa. Hal ini bukan sesuatu yang mudah dicapai mengingat negara ini pernah hancur lebur oleh bom sekutu tahun 1945.

Peran serta dari para politisi atau aktor politik dalam percaturan politik domestik Jepang yang mempunyai hubungan dengan masalah-masalah luar negeri menghasilkan suatu kebijakan politik luar negeri yang lebih condong bersifat reaktif daripada proaktif. Beberapa pendapat di kalangan Barat mengatakan bahwa Jepang baru mau menentukan kebijakan luar negerinya apabila sudah ada semacam "tekanan kuat" dari luar terhadap

Jepang⁹. Dalam menjawab mengapa Jepang sebagai negara maju seolah-olah memiliki ciri-ciri seperti itu atau lebih banyak bersikap menunggu dan ragu-ragu dalam menentukan kebijakan politik luar negerinya, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari sistem dan proses penentuan kebijakan politik dalam negeri.

Sebagai contoh misalnya, walaupun Perdana Menteri Jepang secara kelembagaan merupakan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan politik dalam dan luar negeri, tetapi Konstitusi Jepang menetapkan bahwa kekuasaan eksekutif berada di tangan Kabinet dan bukan di tangan Perdana Menteri. Parlemen di Jepang, seperti juga parlemen di negara-negara Barat, hanya berperan terbatas dalam perundang-undangan. Mayoritas rancangan Undang-Undang bukan berasal dari parlemen melainkan dari pemerintah.

Proses tawar-menawar memungkinkan untuk ditolaknya suatu rancangan Undang-Undang yang dirasa tidak menguntungkan dan sebagai gantinya hasil konsensus partai yang berpengaruh yang diterima. Merupakan suatu pendapat umum di setiap negara bahwa kebijakan politik luar negeri merupakan refleksi dari kepentingan politik dalam negeri. Namun apa yang

⁹ Abdul Hamid, *Jepang Politik Domestik, Global dan Regional*, Universitas Islam Sumatera

terjadi di Jepang tidak jarang bahwa kepentingan politik dalam negeri bisa merupakan faktor yang menjadi kendala terlaksananya politik luar negeri karena adanya kepentingan politik para politisi dalam negeri.

Faktor yang menjadi *x factor* tersebut bisa berupa bermacam hal. Tetapi sangat umum berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Hal ini dapat dilihat misalnya pada adanya *Keidanren* yang merupakan perkumpulan dari berbagai organisasi ekonomi, yang juga merupakan penyumbang dana terbesar dalam kampanye LDP, partai berkuasa di Jepang. Hal ini menjadikan masyarakat bisnis mempunyai cukup pengaruh untuk mempengaruhi kebijakan Jepang. Tidak dapat dipungkiri kalau hubungan yang erat antara *Keidanren* dan LDP merupakan hubungan yang saling menguntungkan untuk menjalin kerjasama.

Bukan rahasia lagi kalau kebijakan yang dikeluarkan Jepang terkait dengan pengerjaan proyek ODA di luar negeri, sangat ditentukan oleh lobi-lobi yang dilakukan oleh para pemilik perusahaan yang ingin mengeruk keuntungan. Kondisi ekonomi Jepang sangat memungkinkan untuk hal itu

Jadi dapat kita simpulkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, bahwa proses lahirnya sebuah kebijakan di Jepang ditentukan oleh beberapa *aktor dalam negeri*, yaitu:

1. Kabinet dan Parlemen (Diet)

Sebagai penyelenggara dan pelaksana pemerintahan di Jepang, Kabinet secara kolektif harus bertanggung jawab kepada Parlemen (Diet). Sebagaimana telah disebutkan tadi, bahwa penyusunan UU di Jepang adalah hak Kabinet dan dapat disusun dengan didasarkan pada kepentingan kelompok. Hal ini menjadi semacam ajang tawar-menawar antara berbagai pihak yang mempunyai kepentingan dengan suatu RUU misalnya, untuk kemudian mendekati para anggota dewan dan melakukan lobi untuk memuluskan tujuannya.

2. Birokrat

Birokrasi di Jepang juga mempunyai peran yang sangat penting dalam perumusan kebijakan politik luar negeri. Para birokrat yang memegang posisi penting di lembaga pemerintahan atau kementerian merupakan salah satu aktor terpenting di dalam negeri yang ikut menentukan kebijakan hubungan luar negeri.

Para birokrat direkrut dari sistem ujian yang sangat ketat dari sejumlah lulusan universitas terkenal yang memiliki reputasi tinggi. Para birokrat terkesan hanya bekerja demi pengabdianya kepada bangsa dan negara. Oleh karena hal itu para birokrat sering dijadikan sasaran oleh pihak penguasa untuk melakukan *dealing* dan kontak-kontak informal melalui makan malam, bermain golf bersama, dll. Dengan melihat kondisi inilah masyarakat Jepang mulai mempertanyakan moralitas kaum birokrat. Dimana mereka sebagai para pengambil keputusan sangat menentukan arah kebijakan Jepang.

3. Kelompok Bisnis

Kelompok bisnis di Jepang merupakan aktor lain yang mempunyai kedudukan cukup penting dalam penentuan kebijakan hubungan dan politik luar negeri Jepang, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi, industri dan perdagangan internasional. Di Jepang sendiri terdapat dua kelompok besar di lingkungan bisnis, disebut *gyokai* dan *zakai*. *Gyokai* mewakili sektor industri dan kepentingan lain yang berdasarkan sektor (misalnya sektor pertanian, perikanan dll)

Gyokai juga merupakan kelompok lobby untuk memperjuangkan kepentingannya melalui berbagai kementerian yang terkait. Sementara *zakai* merupakan organisasi induk kalangan bisnis yang terdiri dari *Keidanren*, *Nissho* (KADIN Jepang) dan *Keizai Doyukai* (Komite Pembangunan Ekonomi Jepang). Peranan dan pengaruh kelompok ini sudah cukup jelas dilihat pada contoh yang telah disebutkan di atas sebelumnya, dimana *Keidanren* merupakan penyokong utama LDP yang merupakan partai berkuasa Jepang¹⁰.

Selain itu masih ada satu *aktor* lain yang juga cukup berpengaruh dengan kebijakan dan politik luar negeri Jepang, yaitu pihak Media. Pemberitaan media merupakan bahan perbandingan bagi para politisi, birokrat dan lingkungan usaha dalam menentukan sikap terhadap suatu isu tertentu.

Dengan melihat pada hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kondisi politik dalam negeri Jepang yang mempengaruhi kebijakan luar negerinya, erat kaitannya dengan hubungan antara kalangan ekonomi dan pemerintah.

Sementara jika kita membahas mengenai konteks internasional (faktor eksternal) dalam kebijakan Jepang, kita dapat berkaca pada

¹⁰ *Ibid*, hal. 110

hubungan Jepang dan Amerika Serikat. Kekalahan Jepang pada perang Dunia ke II membuat Jepang berada pada posisi tawar lebih rendah. Amerika memaksa Jepang merubah konstitusinya, dimana Jepang menjadi negara yang pasifis dan hanya diperbolehkan memiliki angkatan bela diri atau dikenal dengan *Japan Self Defence Force*. Jepang juga secara eksplisit menyatakan dalam pertahanan buku putihnya bahwa Kerjasama Pertahanan AS-Jepang merupakan salah satu kepentingan dalam konteks pertahanan Jepang¹¹.

AS mempunyai kepentingan di kawasan Asia karena dianggap merupakan kawasan yang sangat potensial. Sementara Jepang yang mempunyai keterikatan yang sangat kuat dengan Amerika Serikat dianggap sangat cocok untuk menjadi "kaki tangan" mereka. Jepang membutuhkan perlindungan selama negaranya sekarat akibat kekalahannya di Perang Dunia II, melemahnya ekonomi dan militer dan didukung pula dengan pelarangan militer oleh konstitusi yang kemudian membuat Jepang tidak mempunyai pilihan selain melaksanakan Perjanjian Keamanan yang pernah disepakati kedua negara tersebut. Hal ini tentu saja dimanfaatkan dengan baik oleh Amerika untuk dapat "mengikat" Jepang.

¹¹ Dikutip dari halaman web <http://republikbabi.com/ketergantungan-militer-jepang-pada->

Dominasi AS terhadap Jepang juga otomatis akan menciptakan pengaruh AS terhadap kawasan Asia dimana Jepang menjadi motor utamanya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jikalau kebijakan politik luar negeri Jepang juga sangat kental digunakan untuk mengakomodir kepentingan AS yang pada beberapa tahun belakangan ini memfokuskan diri pada pemberantasan terorisme. Bisa jadi ini merupakan alasan yang kuat bagi Jepang untuk "mengikat" Indonesia sebagai negara yang di "nomor satu"kan. Karena selain dapat memberi keuntungan ekonomi yang cukup besar buat sektor ekonomi Jepang, Indonesia juga ditengarai sebagai salah satu negara yang oleh AS dianggap patut untuk "diwaspadai" segala aktifitasnya yang dicurigai berkaitan dengan kegiatan terorisme dikarenakan oleh penduduknya mayoritas muslim, agama yang diidentikkan AS sebagai teroris. Jepang mendapatkan dua keuntungan dari hal ini. Selain dapat menambah penghasilan, Jepang juga dapat menjadi perpanjangan tangan AS untuk menekan Indonesia secara ekonomi yang sangat berimbas pada kehidupan politiknya.

Sementara dalam menanggapi isu-isu global, Jepang yang juga ambil bagian dalam *Millenium Development Goals* turut serta mengambil posisi dalam perspektif politik yang relative baru, disebut dengan *human security*. *Human security* memfokuskan kepada individual dan pembangunan

masyarakat dimana setiap orang dapat hidup dengan sejahtera dengan dilindungi dan diperkuat dengan individual dan masyarakat yang terbuka terhadap ancaman potensial. Dalam arti yang sebenarnya ini berarti melindungi setiap individu dari rasa “takut”, seperti konflik, terorisme, kejahatan, pelanggaran HAM, penyakit epidemic, penghancuran lingkungan, krisis ekonomi dan bencana alam, dan mengurangi kemiskinan, kelaparan dan pendidikan dan layanan kesehatan yang minim. Dan juga memperkuat individu sehingga mereka dapat memilih dan mengambil tindakan dalam mengatasi ancaman tersebut¹².

Posisi Jepang sendiri dalam kerangka ODA perihal *human security* akan secara langsung memprioritaskan empat isu prioritas yaitu “pengentasan kemiskinan”, “pembangunan berkelanjutan”, “memperhatikan isu-isu global” dan “pembentukan perdamaian” yang telah dimuat dalam Piagam ODA yang akan diselaraskan dengan *human security* dalam rangka mengurangi kerapuhan yang mengancam orang, masyarakat dan negara.

D. Hipotesa

Jepang melakukan amandemen piagam ODA pada tahun 2003 didasarkan pada beberapa alasan. Yaitu :

1. Adanya tekanan kelompok dalam negeri untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
2. Untuk mendukung Amerika Serikat dalam perangnya melawan terorisme dimana dalam amandemen piagam ODA tersebut dikatakan sebagai upaya Jepang untuk menjaga keamanan dunia.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskripsi analisis. Dalam penyajian data penulis mengumpulkan data-data dan teori yang berasal dari berbagai sumber berupa studi kepustakaan (*library research*), artikel, situs-situs internet, dan sumber informasi penunjang serta bahan-bahan kajian lainnya yang berhubungan dengan pokok pembahasan skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah membahas persoalan dalam penulisan skripsi ini maka telah disusun kerangka penulisan sebagai berikut:

- BAB I** Dikemukakan pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Memberikan gambaran mengenai kebijakan politik luar negeri Jepang yang sangat berhubungan erat dengan Amerika Serikat, kebijakan hankam dan ekonomi. Juga memuat tentang peranan Jepang di dunia internasional dan hubungannya dengan kawasan Asia Tenggara termasuk sejarah hubungan Jepang dan Indonesia.
- BAB III** Memberikan penjelasan mengenai bantuan ekonomi ODA Jepang, termasuk sejarah ODA dan kategori prioritas ODA Jepang serta pemberian ODA Jepang kepada Indonesia dalam periode sebelum dan setelah revisi Piagam ODA tahun 2003.
- BAB IV** Menjelaskan latar belakang mengapa Jepang melakukan revisi terhadap piagam ODA pada tahun 2003.
- BAB V** Merupakan penutup dari skripsi ini yang berisikan kesimpulan.